

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan sejak lama menjadi problema lintas dimensi, sebagai konsekuensi terburuk dari pembangunan negara. Kemiskinan dapat memicu sejumlah problema dari dimensi sosial, ekonomi, budaya dan politik. Kemiskinan terjadi akibat ketidakmampuan memenuhi hak-hak dasar untuk hidup layak sesuai peraturan perundang-undangan. Hak dasar yang harus dipenuhi terdiri atas pemenuhan kesehatan, pendidikan, perumahan, nilai gizi, lingkungan hidup dan rasa aman.

Pemenuhan hak dasar pada hakikatnya untuk memenuhi aspek hidup layak bagi kemanusiaan. Maka dapat dikatakan masalah kemiskinan sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan mendunia dan acap kali diidentikkan dengan masalah ekonomi dan sosial, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia dan masalah tersebut ada di seluruh negara, walaupun dampak dari kemiskinan berbeda-beda.

Negara Indonesia yang terletak di kawasan Asia Tenggara dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Pada tahun 2017 tercatat jumlah penduduknya sebesar 262,66 juta jiwa. Data rilis Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,77 juta jiwa pada Maret 2017 nilai

tersebut bertambah sekitar 6.900 jiwa dibandingkan pada September 2016.¹ Jumlah penduduk miskin tersebut bukanlah jumlah yang rendah karena setelah dipersentasekan ternyata menyentuh angka 10,54% dari total jumlah penduduk Indonesia pada semester I (Maret) 2017. Fakta tersebut haruslah menjadi perhatian serius pemerintah dan dicarikan solusinya segera, sebab bila diabaikan angka tersebut akan terus meningkat, bahkan secara ekstrim akan mengancam kesejahteraan penduduk sebab berdampak bagi seluruh aspek kehidupan.

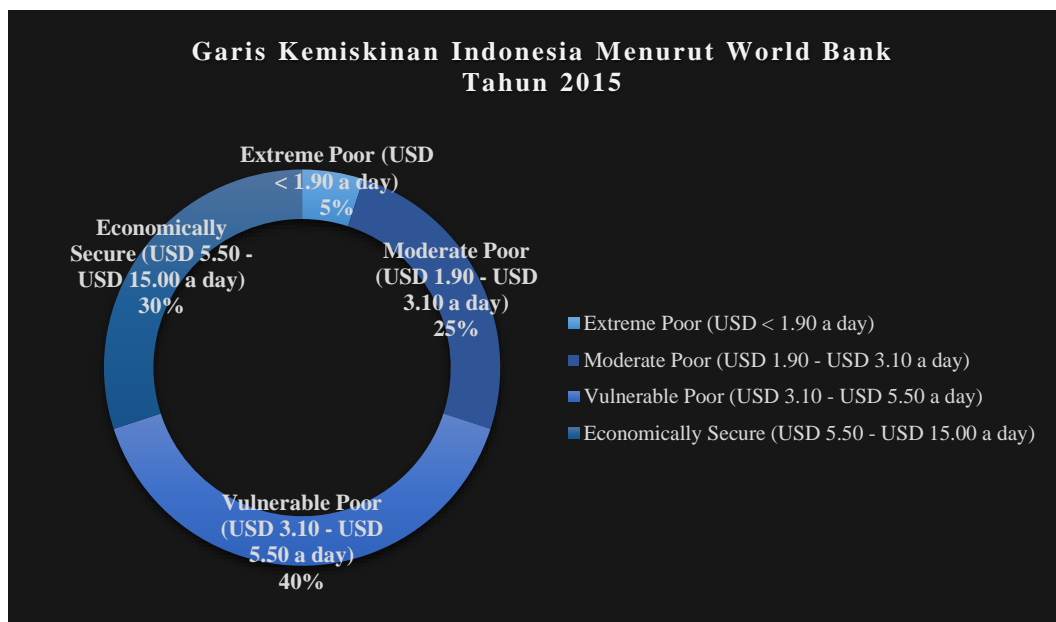
Salah satu poin penting mengenai kemiskinan di Indonesia yakni penduduk Indonesia sering tidak menyadari bahwa dirinya tergolong kedalam jerat kemiskinan. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian terkadang mereka belum tentu menyadari akan kemiskinan yang mereka jalani. Kesadaran terhadap kemiskinan akan dirasakan ketika membandingkan kehidupan yang sedang dijalani dengan kehidupan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan ekonomi lebih tinggi.

Laporan Bank Dunia (*World Bank*) menyampaikan bahwa gambaran kemiskinan Indonesia dengan tolak ukur garis kemiskinan internasional sebesar USD 1,9 per hari mencapai 17,8 juta jiwa atau mencakup 6,8% dari total populasi Indonesia pada Maret 2016.² Maka jika dilihat kembali angka tersebut jauh lebih rendah dari hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan

¹Yoga Sukmana, *Jumlah Penduduk Miskin Naik: Ini Komentar Pemerintah*, Kompas Online, diakses dari www.ekonomi.kompas.com/read/2017/07/18/055114526/jumlah-penduduk-miskin-naik-ini-komentar-pemerintah, pada tanggal 31 Januari 2018, pukul 12:05.

²Kadir Ruslan, *Menurut Bank Dunia: Hanya 30 Persen Orang Indonesia Aman dari Kemiskinan*, Kompasiana, diakses dari www.kompasiana.com/kadirsaja/5a325742dd0fa8510c38fda2/menurut-bank-dunia-hanya-30-persen-orang-indonesia-aman-dari-kemiskinan, pada tanggal 31 Januari, pukul 13:09.

standar kemiskinan nasional sebesar Rp 343.647 per kapita perbulan atau Rp 11.455 per kapita perhari pada tahun 2016 jika diasumsikan bahwa dalam sebulan terdiri atas 30 hari.



Sumber: Publikasi Bank Dunia *Balance Act* 2017 (data sekunder diolah peneliti)³

Gambar I.1

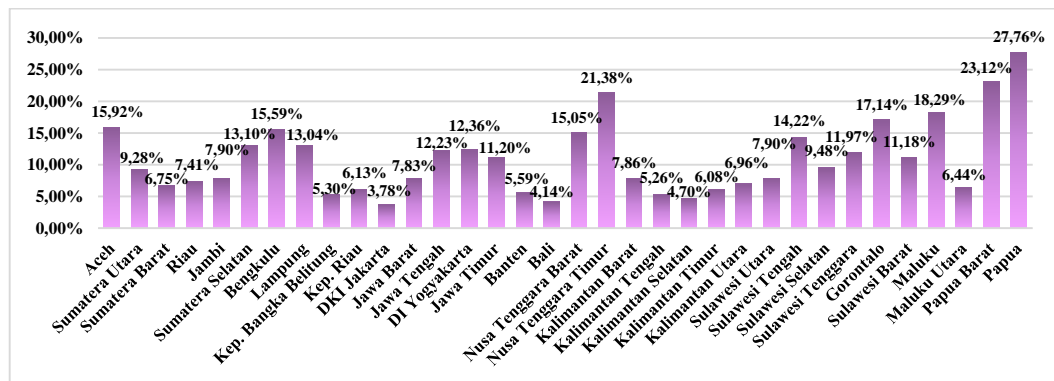
Garis Kemiskinan di Indonesia Publikasi World Bank Tahun 2015

Berdasarkan gambar I.1 pada tahun 2015 terlihat jumlah penduduk Indonesia yang terkategori *extreme poor* relatif lebih rendah dibandingkan penduduk dengan kategori *moderate poor*. Kategori miskin sedang dengan pengeluaran USD 1,90 - USD 3,10 cukup memprihatinkan dengan persentase 25% dari total penduduk Indonesia. Seperti dijelaskan dalam tabel I.1 garis kemiskinan Bank Dunia

³World Bank, *Balancing Act: East Asia and Pacific Economic Update* (Washington DC: World Bank Publications, 2017), h. 79.

didasarkan pada paritas daya beli atau *Purchasing Power Parity* (PPP) yang terdiri atas beberapa kategori yakni *economically secure* (perekonomian dalam kondisi aman), *vulnerable* (rawan kemiskinan), *moderate poor* (kemiskinan sedang) dan *extreme poor* (kemiskinan ekstrim). Dalam membandingkan rupiah dengan dollar AS dalam perspektif PPP, maka sama saja dengan membandingkan daya beli relatif kedua mata uang atas sejumlah barang dan jasa.

Masih pada tabel yang sama, 30% penduduk Indonesia terdeteksi sebagai *economically secure*. Selanjutnya penduduk Indonesia rentan tergolong dalam kategori miskin dengan ditunjukkannya data 40% berada pada *vulnerable poor liner*. *Vulnerable poor* dapat terjun bebas kedalam *extreme poor* apabila terjadi gejala perekonomian yang memukul daya beli masyarakat.



Sumber: BPS Tahun 2018 (data sekunder diolah oleh peneliti)⁴

Gambar I.2 Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2017

Gambar I.2 menunjukkan provinsi dengan presentase penduduk miskin tertinggi berada di provinsi paling timur Indonesia yakni provinsi Papua sebesar

⁴Badan Pusat Statistik, *Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2007-2017*, BPS Online, diakses dari <https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/08/18/1219/presentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007---2017.html>, pada tanggal 12 Februari 2018, pukul 20:05.

27,76% (910.420 jiwa) dan provinsi Papua Barat 23,12% (212.860 jiwa). Sementara yang terendah ada pada provinsi DKI Jakarta 3,78% dengan angka riil penduduk miskin 393.130 jiwa. Perkembangan presentase penduduk miskin antar provinsi-provinsi Indonesia tahun 2017 berfluktuatif sehingga diperlukan beberapa program guna meminimalisasi tingkat fluktuasinya dan dengan demikian pembangunan manusia dapat lebih stabil.

Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki penduduk miskin tertinggi disebabkan letaknya paling timur Indonesia dan keterjangkauan terhadap akses pendidikan, kesehatan dan infrastruktur penunjang ekonomi sangat terbatas. Sementara DKI Jakarta sebagai ibukota Indonesia merupakan pusat pemerintahan dan pusat ekonomi maka tak heran presentase penduduk miskin paling rendah. Hal ini menandakan pembangunan di Indonesia belumlah merata yang tentulah kenyataan tersebut menciderai sila kelima Pancasila, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara logis kebijakan pengentasan kemiskinan yang saat ini digunakan belumlah cukup meng-*cover* pengentasan kemiskinan, berarti diperlukan pengkajian ulang apakah program-program dalam kebijakan tersebut masih layak dipertahankan atau diperbaharui.

Kemiskinan memanglah dapat menjadi efek serius bagi pembangunan manusia Indonesia karena kemiskinan bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang rendah untuk mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan pun terabaikan. Hal tersebut menjadikan *gap* pembangunan manusia di antara keduanya pun menjadi besar dan pada

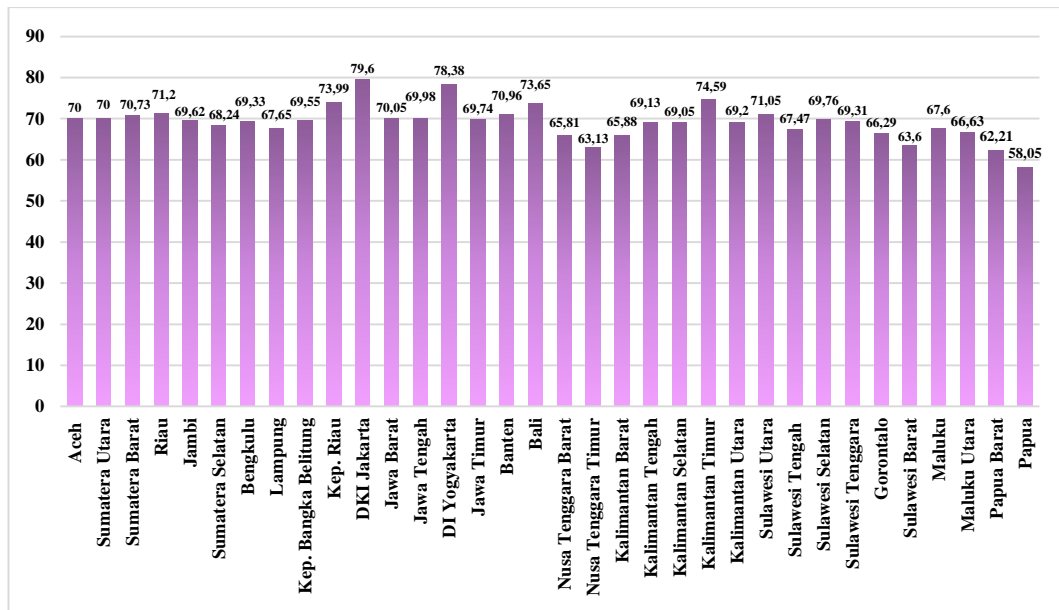
akhirnya target capaian IPM yang ditentukan oleh pemerintah menjadi tidak terealisasi.

UNDP (*United Nations Development Programme*) sebagai lembaga PBB yang secara independen merilis perkembangan *Human Development Index* (HDI) menerbitkan laporan tahun 2015 yang menyebutkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 113 dari 188 negara di dunia dengan kategori *medium human development*. Pencapaian HDI Indonesia berada tepat di atas Palestina (114) dan dibawah Turkmenistan (112). *Human Development Index* Indonesia mencapai 0,689.⁵ Ketika HDI mendekati angka 1,0 maka pembangunan manusia negara semakin baik dan begitu pula sebaliknya.

Komponen HDI Indonesia tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun 2014 diantaranya: pengeluaran bidang kesehatan turun 2% dari 3,1% menjadi 1,1% dari GDP. Pengeluaran bidang pendidikan turun 0,3% dari 3,6% menjadi 3,3% dari GDP. Angka harapan hidup orang Indonesia mencapai 69,1 tahun. Jumlah murid yang di keluarkan dari sekolah (*drop out*) naik dari 11% menjadi 18,1%. Sementara kesenjangan pendidikan tetap sebesar 20,8%.⁶ Fakta tersebut mengkhawatirkan sebab peringkat Indonesia tertinggal dengan Malaysia yang menduduki peringkat 59 dan tergolong *high development index* dan Singapura peringkat 5 dunia (*very high development index*). Secara tidak langsung mencerminkan pendidikan, kesehatan dan ekonomi di Malaysia dan Singapura lebih baik dibanding Indonesia.

⁵World Bank, *Human Development for Everyone: Briefing Note for Indonesia on the 2016 Human Development Report* (Washington DC: World Bank Publications, 2016), h. 4.

⁶United Nations Development Programme (UNDP), *Human Development Report 2016: Human Development for Everyone* ISSN: 0969-4501 (New York: Communications Development Incorporated, 2016), h. 231.



Sumber: BPS Tahun 2018 (data sekunder diolah oleh peneliti)⁷

Gambar I.3 Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2016

Capaian IPM antar provinsi di Indonesia tahun 2016 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada gambar I.3 cukup variatif. Tetapi yang menjadi *point center* dari gambar I.3 adalah IPM provinsi Papua (58,05); Papua Barat (62,21) dan Nusa Tenggara Timur (63,13) yang terbilang rendah. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa daerah Indonesia Timur belum dapat bersaing dengan daerah lain khususnya di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa pada umumnya. Adanya disparitas capaian IPM antar provinsi dikarenakan adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia dan sulitnya masyarakat Indonesia Timur dalam

⁷Badan Pusat Statistik, *Tabel Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru) Tahun 2016*, BPS Online, diakses dari <https://ipm.bps.go.id/data/nasional>, pada tanggal 12 Februari 2018, pukul 20:57.

mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

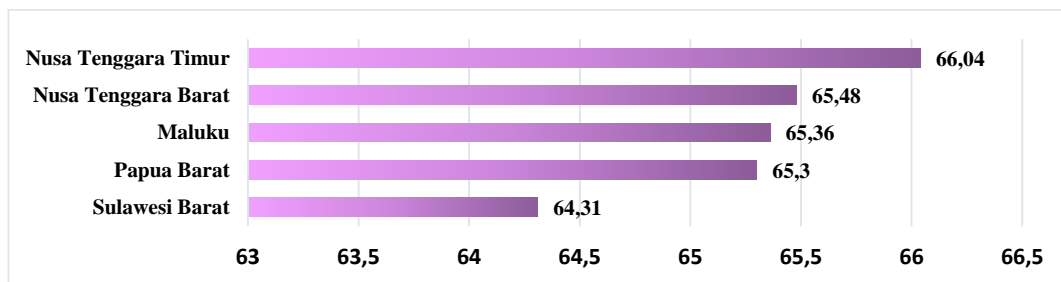
Ukuran kesejahteraan negara dapat dilihat dari beberapa aspek misalnya kesehatan yang ditunjukkan melalui angka harapan hidup, pendidikan oleh rata-rata lama sekolah dan ekonomi melalui pengeluaran per kapita penduduk.

Pertama, merujuk pada penelitian Fima Anggadini pada tahun 2016 angka harapan hidup berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.⁸ Tingginya harapan hidup suatu negara membuktikan tercapainya kualitas pembangunan manusia sekaligus tingkat kesejahteraan negara dan menurunkan angka kemiskinan.

Fakta lain membuktikan penduduk lanjut usia (lansia) merupakan pengguna dana BPJS kesehatan terbesar pada 2016 sampai awal tahun 2017. Biaya yang digunakan untuk kesehatan lansia bahkan menyentuh 59% dari jumlah keseluruhan dana BPJS. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Perhimpunan Gerontologi Medik Indonesia Siti Setiati dalam diskusi peringatan Hari Lanjut Usia Nasional di Kementerian Jakarta pada 29 Mei 2017.⁹ Akses kesehatan di Indonesia sebenarnya sudah mendapat angin segar dengan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), meskipun jumlah pemegang BPJS di Indonesia bertambah tetapi tidak linier dengan kualitas pelayanan yang diberikan berbagai rumah sakit sebagai mitra BPJS Kesehatan.

⁸Fima Anggadini, "Analisis Pengaruh Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2013", *e-Jurnal Katalogis*, Vol. 3 Nomor 7 ISSN: 2302-2019, Juli 2016, h. 41.

⁹Lis Pratiwi, *Lansia Serap Dana BPJS Kesehatan Terbesar*, Metrotvnews, diakses dari <https://m.metrotvnews.com/read/2017/05/29/707192/lansia-serap-dana-bpjs-kesehatan-terbesar>, pada tanggal 31 Januari, pukul 13:09.



Sumber: BPS Tahun 2018 (data sekunder diolah oleh peneliti)¹⁰

Gambar I.4 **Angka Harapan Hidup Terendah di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2016**

Gambar 1.4 menjelaskan bahwa dua provinsi dengan Angka Harapan Hidup terendah oleh provinsi Sulawesi Barat (64,31 tahun) dan Papua Barat (65,3 tahun). AHH yang rendah di provinsi Sulawesi Barat dan Papua Barat dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi yaitu faktor lingkungan, pelayanan kesehatan dan sosial ekonomi. Keadaan lingkungan seperti sanitasi yang buruk, kebersihan lingkungan yang buruk, pemahaman kesehatan masyarakat Papua Barat yang rendah, sumber air minum yang tidak layak, jauhnya masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan telah mengakumulasi rendahnya angka harapan hidup di Papua.

Sangat ironi sejak September 2017 hingga Januari 2018 kasus gizi buruk dan campak di suku Asmat menewaskan 61 anak. Dinkes Papua mencatat sepanjang sepanjang 2017 sampai Januari 2018 sebanyak 393 jiwa menjalani rawat jalan dan 175 jiwa rawat inap di RSUD Asmat karena wabah campak dan gizi buruk.¹¹ Peningkatan campak dan gizi buruk lagi-lagi disebabkan karena akses geografis

¹⁰Badan Pusat Statistik, *Tabel Angka Harapan Hidup Menurut Provinsi di Indonesia (Metode Baru) Tahun 2016*, BPS Online, diakses dari <https://ipm.bps.go.id/data/nasional>, pada tanggal 12 Februari 2018, pukul 21:48.

¹¹John Roy Purba, *4 Bulan Anak Meninggal Akibat Campak dan Gizi Buruk, Ini Kata Bupati Asmat*, Kompas Online, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2018/01/15/12393591/4-bulan-61-anak-meninggal-akibat-campak-dan-gizi-buruk-ini-kata-bupati-asmat>, pada tanggal 12 Februari 2018, pukul 22:01.

Papua yang menjadi tantangan paling utama untuk pemerataan pelayanan publik. Merebaknya penyakit dan rendahnya kualitas pelayanan kesehatan akan bermuara pada tingginya angka mortalitas dan rendahnya angka harapan hidup penduduk.

Kedua, Edi Dores dan Jolianis dalam penelitian tahun 2014 menjelaskan bahwa Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.¹² Berarti dalam hal ini rata-rata lama sekolah berpengaruh pada penurunan tingkat kemiskinan. Pendidikan yang tinggi mampu menekan angka kemiskinan sebab sumber daya yang berkualitas akan terserap di dunia kerja dan mampu untuk memperoleh penghidupan yang layak.

Wajib belajar 12 tahun ialah salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) warga negaranya. Tetapi dalam perjalanannya meskipun telah dikeluarkan Permendikbud No. 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar untuk mendukung program wajib belajar 12 tahun, tidak ada *blue print* (cetak biru) wajib belajar 12 tahun yang dibuat secara mendetail oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Hal ini akan berdampak pada realisasi program RPJMN 2015-2019.¹³ Berkaca dari problematik ini sudah seharusnya dibentuk tata aturan perundang-undangan yang mampu mendorong wajib belajar 12 tahun yang dapat diimplementasikan di lapangan. DPR bersama pemerintah seharusnya menyusun produk legislasi wajib belajar 12 tahun karena berkenaan dengan alokasi APBN.

¹²Edi Dores dkk, "Pengaruh Angka Melek Huruf dan Angka Harapan Hidup terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat", *Journal of Economic and Economic Education Vol.2 No.2 ISSN: 2302-1590 E-ISSN: 2460-190X*, April 2014, hh. 126-133.

¹³Nidia Zuraya, *JPPi Pertanyakan Komitmen Pemerintah Soal Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun*, *Republika Online*, diakses dari <https://m.republika.co.id/berita/pendidikan/education/17/03/14/omrou4383-jppi-pertanyakan-komitmen-pemerintah-soal-kebijakan-wajib-belajar-12-tahun>, pada tanggal 12 Februari 2018, pukul 22:21.

Tahun 2016 RTEI (*Right to Education Index*) merilis peringkat pendidikan. RTEI mengusung 5 indikator yang menjadi bahan pertimbangan, yakni *governance, availability, accessibility, acceptability, dan adaptability*. Dari kelima indikator yang diukur, Indonesia menempati urutan ke-8 dengan skor rata-rata 77,4 dalam skala 100. Indonesia berada di bawah Korea Selatan (peringkat 6 dengan skor 78,6) dan Nigeria (peringkat 7 skor 77,6).¹⁴ Sementara indeks rata-rata lama sekolah di Indonesia menurut BPS pada 2016 7,95 tahun.¹⁵

BPS melansir rata-rata lama sekolah penduduk diatas usia 25 tahun di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016 tergolong rendah karena hanya mencapai 6,79 tahun atau setara kelas satu SMP.¹⁶ Tentulah nilai tersebut masih terbelang jauh dari program pemerintah untuk menempuh jenjang pendidikan 12 tahun sampai tamat Sekolah Menengah Atas. Pemerintah harus *concern* terhadap peningkatan rata-rata lama sekolah dimulai memberikan kesadaran akan pentingnya pendidikan kepada penduduk Indonesia dan menyalurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sampai pelosok negeri.

Fakta tersebut tentu tidaklah berdiri sendiri. Pola pikir suatu negara terhadap pendidikan acap kali berkontribusi dalam meningkatkan indeks pendidikan negaranya. Misalnya paradigma berpikir masyarakat Indonesia dalam memandang pendidikan seringkali dimasukkan kedalam komponen pengeluaran (*cost*) semata

¹⁴Right to Education Index, *General Education Indication Progress Towards the Right to Education in A Country*, RTEI Website Publication, diakses dari <https://www.rtei.org/en/explore/rtei-theme/>, pada tanggal 12 Februari 2018, pukul 22:31.

¹⁵Badan Pusat Statistik, *Tabel Rata-Rata Lama Sekolah di Indonesia Menurut Provinsi (Metode Baru) Tahun 2016*, BPS Online, diakses dari <https://ipm.bps.go.id/data/nasional>, pada tanggal 12 Februari 2018, pukul 22:33.

¹⁶Awaludin, *Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk NTB Rendah*, diakses dari <https://mataram.antaranews.com/berita/32624/rata-rata-lama-sekolah-penduduk-ntb-rendah>, pada tanggal 12 Februari 2018, pukul 22:41.

bukan dipandang sebagai investasi jangka panjang (*long-term investment*). Akibatnya kesadaran untuk menuntut ilmu selama 12 tahun bahkan sampai jenjang perguruan tinggi Indonesia masih tertinggal dibanding Malaysia dan Singapura.

Ketiga, I Putu Finkayana dan Made Urmila Dewi dalam penelitiannya tahun 2016 menjelaskan bahwa Pengeluaran Per Kapita berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali sejak tahun 2003-2015.¹⁷ Aspek krusial dalam pengeluaran per kapita adalah komoditi pangan dan diikuti aspek berikutnya yang meliputi perumahan, pendidikan dan kesehatan. Dengan ketidakmampuan dalam pemenuhan komoditi pangan bagi penduduk akan berdampak pada meningkatnya kemiskinan.

Badan Pusat Statistik melansir pengeluaran per kapita provinsi terendah pada 2016 adalah provinsi Papua dengan Rp 6.637 perhari atau Rp 199.100 perbulan.¹⁸ Hal ini haruslah menjadi perhatian bagi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pengeluaran per kapita provinsi di Indonesia mencerminkan pengeluaran pangan dan non pangan dapat menggambarkan kebutuhan rumah tangganya. Meski harga di berbagai daerah berbeda, namun pengeluaran rumah tangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar provinsi khususnya dilihat dari segi perspektif ekonomi. Distribusi pengeluaran untuk konsumsi berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehingga dengan rendahnya

¹⁷I Putu Finkayana dkk, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indikator Komposit IPM terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2004-2013", *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 5 ISSN: 2303-0178*, Juli 2016, hh. 861-881.

¹⁸Arita Adelheid M Orinbao, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Barat Tahun 2006-2009", *Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Atmajaya Yogyakarta*, 2013, h. 70.

pengeluaran per kapita masyarakat akan mengakibatkan semakin banyaknya penduduk yang berada dalam garis kemiskinan.

Permasalahan negara misalnya pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak dapat digunakan untuk membahas problema kemiskinan yang nantinya dapat ditemukan multi strategi melalui kebijakan yang berkelanjutan. Dari dimensi pendidikan misalnya, rata-rata lama sekolah yang rendah dipandang sebagai penyebab kemiskinan. Dari dimensi kesehatan, rendahnya angka harapan hidup masyarakat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dari dimensi ekonomi, pengeluaran per kapita masyarakat dapat menjadi alasan mendasar mengapa terjadi kemiskinan. Uraian permasalahan tersebut menunjukkan tentang pentingnya bidang kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah) dan ekonomi (pengeluaran per kapita) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan bahwa angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita secara langsung akan membawa pengaruh yang sangat luas bagi perekonomian dalam negeri. Oleh karena itu, pengkajian lebih mendalam diperlukan untuk mengetahui pengaruh atas angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita dalam mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia. Meningkatnya kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini:

1. Rendahnya angka harapan hidup

2. Rendahnya rata-rata lama sekolah
3. Rendahnya pengeluaran per kapita

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, ternyata masalah kemiskinan di Indonesia memiliki penyebab yang sangat luas. Berhubung keterbatasan yang dimiliki peneliti dari segi antara lain: dana, waktu, maka penelitian ini dibatasi hanya pada masalah: “Pengaruh Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita terhadap Kemiskinan serta Hubungannya dengan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia”.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara Angka Harapan Hidup terhadap Kemiskinan di Indonesia ?
2. Apakah terdapat pengaruh antara Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Kemiskinan di Indonesia ?
3. Apakah terdapat pengaruh antara Pengeluaran Per Kapita terhadap Kemiskinan di Indonesia ?
4. Apakah terdapat hubungan antara Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia ?

E. Kegunaan Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah referensi dan menambah sumber pengetahuan baru tentang angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita berpengaruh pada penurunan kemiskinan dan kemiskinan berhubungan dengan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia sehingga penelitian ini dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan, masukan, serta referensi bagi peneliti selanjutnya serta dapat digunakan sebagai salah satu instrumen pemecahan masalah Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita terhadap Kemiskinan serta Hubungannya dengan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.